

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2018)

Noor Cahya Amalia^{1, 1}, Agus Endro Suwarno²

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah**

e-mail: ameliacahya21@gmail.com, agusendro1959@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 - 2018. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD dan PDRB per kapita Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2018. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah analisis rasio keuangan dan kedua adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi menunjukkan Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (growth), artinya semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah tidak akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerahnya maka akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.

Kata kunci : Pemerintah daerah, Kemampuan Keuangan daerah, Kemandirian daerah

Abstract

This study aims to determine the effect of the level of regional financial capacity and regional financial independence on economic growth in districts and cities in Central Java Province in 2015-2018. -2018. Data collection comes from secondary data that is already owned by the relevant agency. There are 2 types of data analysis methods in this study, the first is financial ratio analysis and the second is multiple linear regression. The results of the analysis show that the ratio of regional financial capacity is mostly in a low position and the results of the ratio of regional financial independence are partly in an instructive condition. The regression results show that the regional financial capacity has a negative but insignificant effect on economic

growth, meaning that the higher the level of regional financial capacity will not reduce the level of economic growth. Regional independence has a positive and significant effect, meaning that the higher the ratio of regional independence, the higher the level of economic growth. Efforts are needed for the government to increase revenue that comes from the potential of each region so that it can increase its financial capacity and independence.

Keywords: local government, regional financial capacity, regional independence

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri adalah dalam bidang keuangan, dimana pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi keuangan daerahnya masing-masing. Otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk dikelola sendiri, dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam yang memadai.

Otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan sepenuhnya terhadap kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Masing-masing daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan otonomi merupakan langkah dari pemerintah pusat dalam menyokong tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Dalam memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber penerimaan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini akan memacu peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin giat membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yang dilaksanakan oleh daerah lain di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan besar belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap pengaruh yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu Stannia Cahaya Suci dan Alla Asmara tahun 2014. Stannia Cahaya Suci dan Alla Asmara telah meneliti tentang “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten” Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, dan Rr Retno Sugiharti tahun 2019 meneliti tentang “Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah” Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil analisis rasio kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam kondisi kemampuan keuangan yang sangat kurang, Hasil analisis model pertama menunjukkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian mengenai Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yaitu Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, dan Rr Retno Sugiharti (2019) Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang pengaruh kemampuan keuangan daerah / Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan kemandirian keuangan daerah / Derajat Otonomi Fiskal (DOF) terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan pengamatan laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut periode 2009 – 2013.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2018”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa tengah?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Wonogiri?

2. METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indrianto, 1999). Alat analisis yang digunakan yaitu metode panel data. Menurut Gujarati & Porter (2008, p.591) data panel adalah kombinasi dari cross section dan data time series. Data cross section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau individu. Sedangkan data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) tahun 2015-2018 dari kabupaten/kota se Jawa Tengah yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota se Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Sedangkan sampel yang digunakan adalah bagian terkecil dari jenis laporan realisasi anggaran. Sampel dari laporan realisasi anggaran berupa pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, dan bantuan dari pemerintah pusat/provinsi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2018. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari :

1. Website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah
2. Data atau infomasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah, variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan dan diukur dalam satuan sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerahnnya tahun 2015-2018
2. Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah Jawa Tengah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya tahun 2015-2018
3. Pertumbuhan Ekonomi, dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasharga konstan di Jawa Tengah tahun 2015-2018

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dan regresi linier berganda. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2012:19). Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui rasio kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan daerah. Kedua rasio tersebut dapat dilihat melalui rumusan berikut.

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (DDF) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (DDF):

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Tota Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rasio DDF akan dilihat kedalam pola hubungan yang tertera dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah:

Tabel 1
Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah

| Rasio DDF (%) | Pola Hubungan |
|---------------|---------------|
| 0,00-10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01-20,00 | Kurang |
| 20,01-30,00 | Cukup |
| 30,01-40,00 | Sedang |
| 40,01-50,00 | Baik |

2. Rasio Kemandirian Keuangan Dearah (DOF) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (DOF):

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rasio DFF akan dilihat kedalam pola hubungan yang tertera dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah.

Tabel 2
Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

| Rasio DOF (%) | Pola Hubungan |
|---------------|---------------|
| 0-25 | Instruktif |
| 25-50 | Konsultatif |
| 51-75 | Partisipatif |
| 76-100 | Delegatif |

Analisis statistik

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan metode data panel. Analisis panel data ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rumus sebagai berikut:

a) $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$;

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 , = Koefisien Regresi
 X1 = Kemandirian Keuangan Daerah
 X2 = Kemampuan Keuangan Daerah
 e = Parameter pengganggu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2018 dilakukan dengan cara analisis rasio kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan perhitungan berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

Tabel 3

Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|--------------|------------------------|-------------------------|-------|------------|
| 2015 | Cilacap | 409,845,661,000 | 2,737,224,738,000 | 14.97 | Kurang |
| 2016 | Cilacap | 428,598,350,000 | 2,796,010,345,000 | 15.33 | Kurang |
| 2017 | Cilacap | 645,815,098,000 | 3,064,998,508,000 | 21.07 | Cukup |
| 2018 | Cilacap | 497,353,613,000 | 3,049,351,736,000 | 16.31 | Kurang |
| 2015 | Banyumas | 502,090,461,000 | 2,654,284,992,000 | 18.92 | Kurang |
| 2016 | Banyumas | 541,418,387,000 | 2,852,968,390,000 | 18.98 | Kurang |
| 2017 | Banyumas | 619,701,628,000 | 3,221,258,053,000 | 19.24 | Kurang |
| 2018 | Banyumas | 648,326,914,000 | 3,265,926,652,000 | 19.85 | Kurang |
| 2015 | Purbalingga | 215,622,047,000 | 1,567,587,735,000 | 13.76 | Kurang |
| 2016 | Purbalingga | 251,813,614,000 | 1,746,235,699,000 | 14.42 | Kurang |
| 2017 | Purbalingga | 355,859,003,000 | 1,957,994,897,000 | 18.17 | Kurang |
| 2018 | Purbalingga | 282,679,019,000 | 1,948,442,029,000 | 14.51 | Kurang |
| 2015 | Banjarnegara | 180,561,069,000 | 1,693,503,658,000 | 10.66 | Kurang |
| 2016 | Banjarnegara | 221,048,385,000 | 1,836,015,079,000 | 12.04 | Kurang |
| 2017 | Banjarnegara | 297,485,382,000 | 2,167,801,161,000 | 13.72 | Kurang |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|--------------|------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| 2018 | Banjarnegara | 235,994,436,000 | 2,074,653,162,000 | 11.38 | Kurang |
| 2015 | Kebumen | 245,159,256,000 | 2,326,188,257,000 | 10.54 | Kurang |
| 2016 | Kebumen | 291,016,321,000 | 2,606,209,823,000 | 11.17 | Kurang |
| 2017 | Kebumen | 443,608,863,000 | 2,713,113,398,000 | 16.35 | Kurang |
| 2018 | Kebumen | 351,965,057,000 | 2,639,732,829,000 | 13.33 | Kurang |
| 2015 | Purworejo | 233,934,135,000 | 1,842,491,064,000 | 12.70 | Kurang |
| 2016 | Purworejo | 255,599,242,000 | 2,069,000,842,000 | 12.35 | Kurang |
| 2017 | Purworejo | 298,606,496,000 | 2,114,807,792,000 | 14.12 | Kurang |
| 2018 | Purworejo | 278,952,386,000 | 2,050,879,036,000 | 13.60 | Kurang |
| 2015 | Wonosobo | 182,607,629,000 | 1,432,159,651,000 | 12.75 | Kurang |
| 2016 | Wonosobo | 199,894,767,000 | 1,575,601,833,000 | 12.69 | Kurang |
| 2017 | Wonosobo | 309,170,756,000 | 1,829,290,334,000 | 16.90 | Kurang |
| 2018 | Wonosobo | 226,819,478,000 | 1,851,441,024,000 | 12.25 | Kurang |
| 2015 | Magelang | 261,569,091,000 | 1,945,955,251,000 | 13.44 | Kurang |
| 2016 | Magelang | 288,485,680,000 | 2,036,310,089,000 | 14.17 | Kurang |
| 2017 | Magelang | 403,561,237,000 | 2,217,336,016,000 | 18.20 | Kurang |
| 2018 | Magelang | 325,089,093,000 | 2,302,190,544,000 | 14.12 | Kurang |
| 2015 | Boyolali | 260,633,638,000 | 1,937,150,204,000 | 13.45 | Kurang |
| 2016 | Boyolali | 292,310,032,000 | 1,993,495,112,000 | 14.66 | Kurang |
| 2017 | Boyolali | 388,014,880,000 | 2,176,496,253,000 | 17.83 | Kurang |
| 2018 | Boyolali | 342,957,214,000 | 2,227,780,710,000 | 15.39 | Kurang |
| 2015 | Klaten | 190,608,261,000 | 2,177,806,315,000 | 8.75 | Sangat Kurang |
| 2016 | Klaten | | | 9.93 | Sangat |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|-------------|------------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | 224,197,409,000 | 2,258,604,630,000 | | Kurang |
| 2017 | Klaten | 371,520,334,000 | 2,581,317,190,000 | 14.39 | Kurang |
| 2018 | Klaten | 373,770,434,000 | 2,545,432,179,000 | 14.68 | Kurang |
| 2015 | Sukoharjo | 313,947,492,000 | 1,784,106,364,000 | 17.60 | Kurang |
| 2016 | Sukoharjo | 363,163,428,000 | 1,931,896,575,000 | 18.80 | Kurang |
| 2017 | Sukoharjo | 464,567,410,000 | 2,055,571,034,000 | 22.60 | Cukup |
| 2018 | Sukoharjo | 433,485,481,000 | 2,055,517,964,000 | 21.09 | Cukup |
| 2015 | Wonogiri | 211,208,602,000 | 1,963,704,539,000 | 10.76 | Kurang |
| 2016 | Wonogiri | 218,604,854,000 | 2,035,056,535,000 | 10.74 | Kurang |
| 2017 | Wonogiri | 333,840,435,000 | 2,317,978,657,000 | 14.40 | Kurang |
| 2018 | Wonogiri | 269,032,428,000 | 2,298,176,601,000 | 11.71 | Kurang |
| 2015 | Karanganyar | 255,442,883,000 | 1,834,206,713,000 | 13.93 | Kurang |
| 2016 | Karanganyar | 301,307,803,000 | 2,012,335,065,000 | 14.97 | Kurang |
| 2017 | Karanganyar | 415,142,563,000 | 2,043,460,306,000 | 20.32 | Cukup |
| 2018 | Karanganyar | 343,156,469,000 | 2,113,929,232,000 | 16.23 | Kurang |
| 2015 | Sragen | 267,711,820,000 | 2,024,057,425,000 | 13.23 | Kurang |
| 2016 | Sragen | 297,176,334,000 | 2,092,759,143,000 | 14.20 | Kurang |
| 2017 | Sragen | 404,555,766,000 | 2,187,019,047,000 | 18.50 | Kurang |
| 2018 | Sragen | 334,303,284,000 | 2,176,997,512,000 | 15.36 | Kurang |
| 2015 | Grobogan | 272,718,438,000 | 2,017,588,935,000 | 13.52 | Kurang |
| 2016 | Grobogan | 299,211,314,000 | 2,203,275,381,000 | 13.58 | Kurang |
| 2017 | Grobogan | 440,456,236,000 | 2,426,674,661,000 | 18.15 | Kurang |
| 2018 | Grobogan | 315,743,176,000 | 2,439,501,262,000 | 12.94 | Kurang |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|---------|------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| 2015 | Blora | 74,339,697,000 | 1,566,728,674,000 | 4.74 | Sangat Kurang |
| 2016 | Blora | 183,649,910,000 | 1,870,560,303,000 | 9.82 | Sangat Kurang |
| 2017 | Blora | 280,047,450,000 | 2,013,834,875,000 | 13.91 | Kurang |
| 2018 | Blora | 203,166,113,000 | 2,120,654,753,000 | 9.58 | Sangat Kurang |
| 2015 | Rembang | 200,954,036,000 | 1,416,781,812,000 | 14.18 | Kurang |
| 2016 | Rembang | 234,168,365,000 | 1,564,868,839,000 | 14.96 | Kurang |
| 2017 | Rembang | 318,049,266,000 | 1,739,982,890,000 | 18.28 | Kurang |
| 2018 | Rembang | 305,676,436,000 | 1,794,911,075,000 | 17.03 | Kurang |
| 2015 | Pati | 309,365,697,000 | 2,180,994,017,000 | 14.18 | Kurang |
| 2016 | Pati | 322,001,601,000 | 2,452,144,206,000 | 13.13 | Kurang |
| 2017 | Pati | 428,374,750,000 | 2,747,796,348,000 | 15.59 | Kurang |
| 2018 | Pati | 383,912,843,000 | 2,750,282,961,000 | 13.96 | Kurang |
| 2015 | Kudus | 255,284,093,000 | 1,755,769,420,000 | 14.54 | Kurang |
| 2016 | Kudus | 291,805,516,000 | 1,893,566,378,000 | 15.41 | Kurang |
| 2017 | Kudus | 366,031,204,000 | 1,983,213,078,000 | 18.46 | Kurang |
| 2018 | Kudus | 337,364,609,000 | 1,996,530,094,000 | 16.90 | Kurang |
| 2015 | Jepara | 270,251,583,000 | 1,930,958,696,000 | 14.00 | Kurang |
| 2016 | Jepara | 322,509,753,000 | 2,106,087,672,000 | 15.31 | Kurang |
| 2017 | Jepara | 331,060,969,000 | 2,170,605,186,000 | 15.25 | Kurang |
| 2018 | Jepara | 369,330,455,000 | 2,255,843,022,000 | 16.37 | Kurang |
| 2015 | Demak | 254,324,490,000 | 1,786,987,657,000 | 14.23 | Kurang |
| 2016 | Demak | 287,457,501,000 | 1,952,459,922,000 | 14.72 | Kurang |
| 2017 | Demak | | | 15.02 | Kurang |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|------------|------------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | 309,612,407,000 | 2,060,864,280,000 | | |
| 2018 | Demak | 342,324,870,000 | 2,143,306,259,000 | 15.97 | Kurang |
| 2015 | Semarang | 278,851,901,000 | 1,677,158,224,000 | 16.63 | Kurang |
| 2016 | Semarang | 318,536,052,000 | 1,978,138,017,000 | 16.10 | Kurang |
| 2017 | Semarang | 417,417,849,000 | 2,135,227,865,000 | 19.55 | Kurang |
| 2018 | Semarang | 383,475,678,000 | 2,117,416,567,000 | 18.11 | Kurang |
| 2015 | Temanggung | 212,498,140,000 | 1,469,482,958,000 | 14.46 | Kurang |
| 2016 | Temanggung | 281,328,149,000 | 1,678,688,079,000 | 16.76 | Kurang |
| 2017 | Temanggung | 308,466,748,000 | 1,779,850,394,000 | 17.33 | Kurang |
| 2018 | Temanggung | 252,019,935,000 | 1,731,235,867,000 | 14.56 | Kurang |
| 2015 | Kendal | 239,340,238,000 | 1,720,297,185,000 | 13.91 | Kurang |
| 2016 | Kendal | 265,298,572,000 | 1,888,952,259,000 | 14.04 | Kurang |
| 2017 | Kendal | 404,911,989,000 | 2,047,488,421,000 | 19.78 | Kurang |
| 2018 | Kendal | 335,842,483,000 | 2,138,513,509,000 | 15.70 | Kurang |
| 2015 | Batang | 179,721,274,000 | 1,396,266,245,000 | 12.87 | Kurang |
| 2016 | Batang | 209,920,641,000 | 1,498,577,176,000 | 14.01 | Kurang |
| 2017 | Batang | 219,807,129,000 | 1,566,154,721,000 | 14.03 | Kurang |
| 2018 | Batang | 237,547,973,000 | 1,701,877,299,000 | 13.96 | Kurang |
| 2015 | Pekalongan | 251,558,971,000 | 1,697,594,551,000 | 14.82 | Kurang |
| 2016 | Pekalongan | 310,572,581,000 | 1,787,351,674,000 | 17.38 | Kurang |
| 2017 | Pekalongan | 305,394,299,000 | 2,067,907,852,000 | 14.77 | Kurang |
| 2018 | Pekalongan | 311,288,144,000 | 2,101,449,302,000 | 14.81 | Kurang |
| 2015 | Pemalang | 230,435,213,000 | 1,966,423,491,000 | 11.72 | Kurang |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|----------------|------------------------|-------------------------|-------|------------|
| 2016 | Pemalang | 275,432,414,000 | 2,112,488,640,000 | 13.04 | Kurang |
| 2017 | Pemalang | 425,893,267,000 | 2,353,030,275,000 | 18.10 | Kurang |
| 2018 | Pemalang | 300,481,887,000 | 2,428,263,886,000 | 12.37 | Kurang |
| 2015 | Tegal | 304,000,970,000 | 2,097,095,623,000 | 14.50 | Kurang |
| 2016 | Tegal | 316,051,190,000 | 2,161,161,059,000 | 14.62 | Kurang |
| 2017 | Tegal | 375,531,165,000 | 2,450,766,552,000 | 15.32 | Kurang |
| 2018 | Tegal | 372,282,676,000 | 2,524,365,920,000 | 14.75 | Kurang |
| 2015 | Brebes | 301,953,710,000 | 2,417,210,236,000 | 12.49 | Kurang |
| 2016 | Brebes | 339,156,063,000 | 2,572,334,594,000 | 13.18 | Kurang |
| 2017 | Brebes | 528,836,444,000 | 2,857,109,730,000 | 18.51 | Kurang |
| 2018 | Brebes | 346,907,973,000 | 2,854,043,939,000 | 12.15 | Kurang |
| 2015 | Kota Magelang | 186,677,410,000 | 781,335,800,000 | 23.89 | Cukup |
| 2016 | Kota Magelang | 220,315,849,000 | 840,042,626,000 | 26.23 | Cukup |
| 2017 | Kota Magelang | 233,557,714,000 | 909,525,863,000 | 25.68 | Cukup |
| 2018 | Kota Magelang | 249,877,425,000 | 908,089,486,000 | 27.52 | Cukup |
| 2015 | Kota Surakarta | 372,798,426,000 | 1,568,482,687,000 | 23.77 | Cukup |
| 2016 | Kota Surakarta | 425,502,777,000 | 1,703,003,846,000 | 24.99 | Cukup |
| 2017 | Kota Surakarta | 527,544,225,000 | 1,803,920,802,000 | 29.24 | Cukup |
| 2018 | Kota Surakarta | 525,125,555,000 | 1,879,056,017,000 | 27.95 | Cukup |
| 2015 | Kota Salatiga | 167,010,555,000 | 622,993,179,000 | 26.81 | Cukup |
| 2016 | Kota Salatiga | 240,058,811,000 | 879,784,189,000 | 27.29 | Cukup |
| 2017 | Kota Salatiga | 218,442,435,000 | 880,945,156,000 | 24.80 | Cukup |
| 2018 | Kota | | | 23.48 | Cukup |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio | Keterangan |
|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------|------------|
| | Salatiga | 208,926,057,000 | 889,992,411,000 | | |
| 2015 | Kota Semarang | 1,107,053,257,000 | 3,263,824,536,000 | 33.92 | Sedang |
| 2016 | Kota Semarang | 1,491,645,899,000 | 4,103,151,795,000 | 36.35 | Sedang |
| 2017 | Kota Semarang | 1,791,886,379,000 | 3,964,574,308,000 | 45.20 | Baik |
| 2018 | Kota Semarang | 1,821,274,103,000 | 4,234,394,211,000 | 43.01 | Baik |
| 2015 | Kota Pekalongan | 152,044,596,000 | 809,733,612,000 | 18.78 | Kurang |
| 2016 | Kota Pekalongan | 178,602,065,000 | 857,640,590,000 | 20.82 | Cukup |
| 2017 | Kota Pekalongan | 192,002,871,000 | 915,920,377,000 | 20.96 | Cukup |
| 2018 | Kota Pekalongan | 179,224,409,000 | 905,231,573,000 | 19.80 | Kurang |
| 2015 | Kota Tegal | 271,601,409,000 | 947,468,621,000 | 28.67 | Cukup |
| 2016 | Kota Tegal | 287,342,174,000 | 1,051,119,749,000 | 27.34 | Cukup |
| 2017 | Kota Tegal | 306,830,656,000 | 1,024,765,938,000 | 29.94 | Cukup |
| 2018 | Kota Tegal | 275,021,448,000 | 987,244,236,000 | 27.86 | Cukup |

Rasio kemampuan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 4.4 diatas. Menurut perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemampuan Keuangan Daerah selama empat tahun pada sebagian besar pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih dalam skala interval yang kurang, karena berada dalam skala interval antara 10,00-20,00 ini berarti bahwa PAD pada sebagian besar pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Tengah mempunyai kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerahnnya. Sehingga dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya, sebagian besar pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Terdapat daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rasio kemampuan keuangan daerah dengan kriteria sangat kurang yaitu kabupaten Klaten tahun 2015-2016 dan kabupaten Blora tahun 2015, 2016, dan 2018. Daerah yang memiliki rasio kemampuan keuangan daerah dengan kriteria cukup yaitu kabupaten Cilacap tahun 2017, Kabupaten Sukoharjo 2017,2018, Kabupaten Karanganyar tahun 2017, Kota Magelang tahun 2015-2018, Kota Surakarta 2015-2018, Kota Salatiga tahun 2015-2018, Kota Pekalongan tahun 2016, 2017, dan kota Tegal tahun 2015-2018.

Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Dearah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Widodo, 2001) dengan menggunakan perhitungan berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan dari pemerintah pusat/provinsi. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 4
Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|--------------|------------------------|-------------------|-------|-------------|
| 2015 | Cilacap | 409,845,661,000 | 2,327,379,077,000 | 17.61 | Instruktif |
| 2016 | Cilacap | 428,598,350,000 | 2,367,411,995,000 | 18.10 | Instruktif |
| 2017 | Cilacap | 645,815,098,000 | 2,419,183,410,000 | 26.70 | Konsultatif |
| 2018 | Cilacap | 497,353,613,000 | 2,551,998,123,000 | 19.49 | Instruktif |
| 2015 | Banyumas | 502,090,461,000 | 2,152,194,531,000 | 23.33 | Instruktif |
| 2016 | Banyumas | 541,418,387,000 | 2,311,550,003,000 | 23.42 | Instruktif |
| 2017 | Banyumas | 619,701,628,000 | 2,601,556,425,000 | 23.82 | Instruktif |
| 2018 | Banyumas | 648,326,914,000 | 2,617,599,738,000 | 24.77 | Instruktif |
| 2015 | Purbalingga | 215,622,047,000 | 1,351,965,688,000 | 15.95 | Instruktif |
| 2016 | Purbalingga | 251,813,614,000 | 1,494,422,085,000 | 16.85 | Instruktif |
| 2017 | Purbalingga | 355,859,003,000 | 1,602,135,894,000 | 22.21 | Instruktif |
| 2018 | Purbalingga | 282,679,019,000 | 1,665,763,010,000 | 16.97 | Instruktif |
| 2015 | Banjarnegara | 180,561,069,000 | 1,512,942,589,000 | 11.93 | Instruktif |
| 2016 | Banjarnegara | 221,048,385,000 | 1,614,966,694,000 | 13.69 | Instruktif |
| 2017 | Banjarnegara | 297,485,382,000 | 1,870,315,779,000 | 15.91 | Instruktif |
| 2018 | Banjarnegara | 235,994,436,000 | 1,838,658,726,000 | 12.84 | Instruktif |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|-----------|------------------------|-------------------|-------|------------|
| 2015 | Kebumen | 245,159,256,000 | 2,081,029,001,000 | 11.78 | Instruktif |
| 2016 | Kebumen | 291,016,321,000 | 2,315,193,502,000 | 12.57 | Instruktif |
| 2017 | Kebumen | 443,608,863,000 | 2,269,504,535,000 | 19.55 | Instruktif |
| 2018 | Kebumen | 351,965,057,000 | 2,211,220,458,000 | 15.92 | Instruktif |
| 2015 | Purworejo | 233,934,135,000 | 1,608,556,929,000 | 14.54 | Instruktif |
| 2016 | Purworejo | 255,599,242,000 | 1,813,401,600,000 | 14.10 | Instruktif |
| 2017 | Purworejo | 298,606,496,000 | 1,816,201,296,000 | 16.44 | Instruktif |
| 2018 | Purworejo | 278,952,386,000 | 1,771,926,650,000 | 15.74 | Instruktif |
| 2015 | Wonosobo | 182,607,629,000 | 1,249,552,022,000 | 14.61 | Instruktif |
| 2016 | Wonosobo | 199,894,767,000 | 1,375,707,066,000 | 14.53 | Instruktif |
| 2017 | Wonosobo | 309,170,756,000 | 1,520,119,578,000 | 20.34 | Instruktif |
| 2018 | Wonosobo | 226,819,478,000 | 1,624,621,546,000 | 13.96 | Instruktif |
| 2015 | Magelang | 261,569,091,000 | 1,684,386,160,000 | 15.53 | Instruktif |
| 2016 | Magelang | 288,485,680,000 | 1,747,824,409,000 | 16.51 | Instruktif |
| 2017 | Magelang | 403,561,237,000 | 1,813,774,779,000 | 22.25 | Instruktif |
| 2018 | Magelang | 325,089,093,000 | 1,977,101,451,000 | 16.44 | Instruktif |
| 2015 | Boyolali | 260,633,638,000 | 1,676,516,566,000 | 15.55 | Instruktif |
| 2016 | Boyolali | 292,310,032,000 | 1,701,185,080,000 | 17.18 | Instruktif |
| 2017 | Boyolali | 388,014,880,000 | 1,788,481,373,000 | 21.70 | Instruktif |
| 2018 | Boyolali | 342,957,214,000 | 1,884,823,496,000 | 18.20 | Instruktif |
| 2015 | Klaten | 190,608,261,000 | 1,987,198,054,000 | 9.59 | Instruktif |
| 2016 | Klaten | 224,197,409,000 | 2,034,407,221,000 | 11.02 | Instruktif |
| 2017 | Klaten | | | 16.81 | Instruktif |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|-------------|------------------------|-------------------|-------|-------------|
| | | 371,520,334,000 | 2,209,796,856,000 | | |
| 2018 | Klaten | 373,770,434,000 | 2,171,661,745,000 | 17.21 | Instruktif |
| 2015 | Sukoharjo | 313,947,492,000 | 1,470,158,872,000 | 21.35 | Instruktif |
| 2016 | Sukoharjo | 363,163,428,000 | 1,568,733,147,000 | 23.15 | Instruktif |
| 2017 | Sukoharjo | 464,567,410,000 | 1,591,003,624,000 | 29.20 | Konsultatif |
| 2018 | Sukoharjo | 433,485,481,000 | 1,622,032,483,000 | 26.72 | Konsultatif |
| 2015 | Wonogiri | 211,208,602,000 | 1,752,495,938,000 | 12.05 | Instruktif |
| 2016 | Wonogiri | 218,604,854,000 | 1,816,451,681,000 | 12.03 | Instruktif |
| 2017 | Wonogiri | 333,840,435,000 | 1,984,138,222,000 | 16.83 | Instruktif |
| 2018 | Wonogiri | 269,032,428,000 | 2,029,144,173,000 | 13.26 | Instruktif |
| 2015 | Karanganyar | 255,442,883,000 | 1,578,763,830,000 | 16.18 | Instruktif |
| 2016 | Karanganyar | 301,307,803,000 | 1,711,027,262,000 | 17.61 | Instruktif |
| 2017 | Karanganyar | 415,142,563,000 | 1,628,317,743,000 | 25.50 | Konsultatif |
| 2018 | Karanganyar | 343,156,469,000 | 1,770,772,763,000 | 19.38 | Instruktif |
| 2015 | Sragen | 267,711,820,000 | 1,756,345,605,000 | 15.24 | Instruktif |
| 2016 | Sragen | 297,176,334,000 | 1,795,582,809,000 | 16.55 | Instruktif |
| 2017 | Sragen | 404,555,766,000 | 1,782,463,281,000 | 22.70 | Instruktif |
| 2018 | Sragen | 334,303,284,000 | 1,842,694,228,000 | 18.14 | Instruktif |
| 2015 | Grobogan | 272,718,438,000 | 1,744,870,497,000 | 15.63 | Instruktif |
| 2016 | Grobogan | 299,211,314,000 | 1,904,064,067,000 | 15.71 | Instruktif |
| 2017 | Grobogan | 440,456,236,000 | 1,986,218,425,000 | 22.18 | Instruktif |
| 2018 | Grobogan | 315,743,176,000 | 2,123,758,086,000 | 14.87 | Instruktif |
| 2015 | Blora | 74,339,697,000 | 1,492,388,977,000 | 4.98 | Instruktif |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|---------|------------------------|-------------------|-------|------------|
| 2016 | Blora | 183,649,910,000 | 1,686,910,393,000 | 10.89 | Instruktif |
| 2017 | Blora | 280,047,450,000 | 1,733,787,425,000 | 16.15 | Instruktif |
| 2018 | Blora | 203,166,113,000 | 1,917,488,640,000 | 10.60 | Instruktif |
| 2015 | Rembang | 200,954,036,000 | 1,215,827,776,000 | 16.53 | Instruktif |
| 2016 | Rembang | 234,168,365,000 | 1,330,700,474,000 | 17.60 | Instruktif |
| 2017 | Rembang | 318,049,266,000 | 1,421,933,624,000 | 22.37 | Instruktif |
| 2018 | Rembang | 305,676,436,000 | 1,489,234,639,000 | 20.53 | Instruktif |
| 2015 | Pati | 309,365,697,000 | 1,871,628,320,000 | 16.53 | Instruktif |
| 2016 | Pati | 322,001,601,000 | 2,130,142,605,000 | 15.12 | Instruktif |
| 2017 | Pati | 428,374,750,000 | 2,319,421,598,000 | 18.47 | Instruktif |
| 2018 | Pati | 383,912,843,000 | 2,366,370,118,000 | 16.22 | Instruktif |
| 2015 | Kudus | 255,284,093,000 | 1,500,485,327,000 | 17.01 | Instruktif |
| 2016 | Kudus | 291,805,516,000 | 1,601,760,862,000 | 18.22 | Instruktif |
| 2017 | Kudus | 366,031,204,000 | 1,617,181,874,000 | 22.63 | Instruktif |
| 2018 | Kudus | 337,364,609,000 | 1,659,165,485,000 | 20.33 | Instruktif |
| 2015 | Jepara | 270,251,583,000 | 1,660,707,113,000 | 16.27 | Instruktif |
| 2016 | Jepara | 322,509,753,000 | 1,783,577,919,000 | 18.08 | Instruktif |
| 2017 | Jepara | 331,060,969,000 | 1,839,544,217,000 | 18.00 | Instruktif |
| 2018 | Jepara | 369,330,455,000 | 1,886,512,567,000 | 19.58 | Instruktif |
| 2015 | Demak | 254,324,490,000 | 1,532,663,167,000 | 16.59 | Instruktif |
| 2016 | Demak | 287,457,501,000 | 1,665,002,421,000 | 17.26 | Instruktif |
| 2017 | Demak | 309,612,407,000 | 1,751,251,873,000 | 17.68 | Instruktif |
| 2018 | Demak | | | 19.01 | Instruktif |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|------------|------------------------|-------------------|-------|------------|
| | | 342,324,870,000 | 1,800,981,389,000 | | |
| 2015 | Semarang | 278,851,901,000 | 1,398,306,323,000 | 19.94 | Instruktif |
| 2016 | Semarang | 318,536,052,000 | 1,659,601,965,000 | 19.19 | Instruktif |
| 2017 | Semarang | 417,417,849,000 | 1,717,810,016,000 | 24.30 | Instruktif |
| 2018 | Semarang | 383,475,678,000 | 1,733,940,889,000 | 22.12 | Instruktif |
| 2015 | Temanggung | 212,498,140,000 | 1,256,984,818,000 | 16.91 | Instruktif |
| 2016 | Temanggung | 281,328,149,000 | 1,397,359,930,000 | 20.13 | Instruktif |
| 2017 | Temanggung | 308,466,748,000 | 1,471,383,646,000 | 20.96 | Instruktif |
| 2018 | Temanggung | 252,019,935,000 | 1,479,215,932,000 | 17.04 | Instruktif |
| 2015 | Kendal | 239,340,238,000 | 1,480,956,947,000 | 16.16 | Instruktif |
| 2016 | Kendal | 265,298,572,000 | 1,623,653,687,000 | 16.34 | Instruktif |
| 2017 | Kendal | 404,911,989,000 | 1,642,576,432,000 | 24.65 | Instruktif |
| 2018 | Kendal | 335,842,483,000 | 1,802,671,026,000 | 18.63 | Instruktif |
| 2015 | Batang | 179,721,274,000 | 1,216,544,971,000 | 14.77 | Instruktif |
| 2016 | Batang | 209,920,641,000 | 1,288,656,535,000 | 16.29 | Instruktif |
| 2017 | Batang | 219,807,129,000 | 1,346,347,592,000 | 16.33 | Instruktif |
| 2018 | Batang | 237,547,973,000 | 1,464,329,326,000 | 16.22 | Instruktif |
| 2015 | Pekalongan | 251,558,971,000 | 1,446,035,580,000 | 17.40 | Instruktif |
| 2016 | Pekalongan | 310,572,581,000 | 1,476,779,093,000 | 21.03 | Instruktif |
| 2017 | Pekalongan | 305,394,299,000 | 1,762,513,553,000 | 17.33 | Instruktif |
| 2018 | Pekalongan | 311,288,144,000 | 1,790,161,158,000 | 17.39 | Instruktif |
| 2015 | Pemalang | 230,435,213,000 | 1,756,346,334,000 | 13.12 | Instruktif |
| 2016 | Pemalang | 275,432,414,000 | 1,837,056,226,000 | 14.99 | Instruktif |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|----------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|
| 2017 | Pemalang | 425,893,267,000 | 1,927,137,008,000 | 22.10 | Instruktif |
| 2018 | Pemalang | 300,481,887,000 | 2,127,781,999,000 | 14.12 | Instruktif |
| 2015 | Tegal | 304,000,970,000 | 1,793,094,653,000 | 16.95 | Instruktif |
| 2016 | Tegal | 316,051,190,000 | 1,845,109,869,000 | 17.13 | Instruktif |
| 2017 | Tegal | 375,531,165,000 | 2,075,235,387,000 | 18.10 | Instruktif |
| 2018 | Tegal | 372,282,676,000 | 2,152,083,244,000 | 17.30 | Instruktif |
| 2015 | Brebes | 301,953,710,000 | 2,115,256,526,000 | 14.28 | Instruktif |
| 2016 | Brebes | 339,156,063,000 | 2,233,178,531,000 | 15.19 | Instruktif |
| 2017 | Brebes | 528,836,444,000 | 2,328,273,286,000 | 22.71 | Instruktif |
| 2018 | Brebes | 346,907,973,000 | 2,507,135,966,000 | 13.84 | Instruktif |
| 2015 | Kota Magelang | 186,677,410,000 | 594,658,390,000 | 31.39 | Konsultatif |
| 2016 | Kota Magelang | 220,315,849,000 | 619,726,777,000 | 35.55 | Konsultatif |
| 2017 | Kota Magelang | 233,557,714,000 | 675,968,149,000 | 34.55 | Konsultatif |
| 2018 | Kota Magelang | 249,877,425,000 | 658,212,061,000 | 37.96 | Konsultatif |
| 2015 | Kota Surakarta | 372,798,426,000 | 1,195,684,261,000 | 31.18 | Konsultatif |
| 2016 | Kota Surakarta | 425,502,777,000 | 1,277,501,069,000 | 33.31 | Konsultatif |
| 2017 | Kota Surakarta | 527,544,225,000 | 1,276,376,577,000 | 41.33 | Konsultatif |
| 2018 | Kota Surakarta | 525,125,555,000 | 1,353,930,462,000 | 38.79 | Konsultatif |
| 2015 | Kota Salatiga | 167,010,555,000 | 455,982,624,000 | 36.63 | Konsultatif |
| 2016 | Kota Salatiga | 240,058,811,000 | 639,725,378,000 | 37.53 | Konsultatif |
| 2017 | Kota Salatiga | 218,442,435,000 | 662,502,721,000 | 32.97 | Konsultatif |
| 2018 | Kota Salatiga | 208,926,057,000 | 681,066,354,000 | 30.68 | Konsultatif |
| 2015 | Kota | | | 51.33 | Partisipatif |

| Tahun | Kota | Pendapatan Asli Daerah | Dana Transfer | Rasio | Keterangan |
|-------|-----------------|------------------------|-------------------|-------|--------------|
| | Semarang | 1,107,053,257,000 | 2,156,771,279,000 | | |
| 2016 | Kota Semarang | 1,491,645,899,000 | 2,611,505,896,000 | 57.12 | Partisipatif |
| 2017 | Kota Semarang | 1,791,886,379,000 | 2,172,687,929,000 | 82.47 | Delegatif |
| 2018 | Kota Semarang | 1,821,274,103,000 | 2,413,120,108,000 | 75.47 | Delegatif |
| 2015 | Kota Pekalongan | 152,044,596,000 | 657,689,016,000 | 23.12 | Instruktif |
| 2016 | Kota Pekalongan | 178,602,065,000 | 679,038,525,000 | 26.30 | Konsultatif |
| 2017 | Kota Pekalongan | 192,002,871,000 | 723,917,506,000 | 26.52 | Konsultatif |
| 2018 | Kota Pekalongan | 179,224,409,000 | 726,007,164,000 | 24.69 | Instruktif |
| 2015 | Kota Tegal | 271,601,409,000 | 675,867,212,000 | 40.19 | Konsultatif |
| 2016 | Kota Tegal | 287,342,174,000 | 763,777,575,000 | 37.62 | Konsultatif |
| 2017 | Kota Tegal | 306,830,656,000 | 717,935,282,000 | 42.74 | Konsultatif |
| 2018 | Kota Tegal | 275,021,448,000 | 712,222,788,000 | 38.61 | Konsultatif |

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian pada daerah di Jawa Tengah memiliki rata-rata tingkat kemandirian dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0-25 %. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah di Jawa Tengah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Analisis Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil perhitungan dalam penelitian ini variabel independen yakni Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan Kemandirian Daerah (KMD) diduga mempengaruhi variabel dependen yakni Pertumbuhan Ekonomi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan alat analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut :

Tabel 5

Hasil estimasi model pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 5,464 | ,189 | | 28,877 | ,000 |
| | X1 | -,047 | ,034 | -,745 | -1,385 | ,169 |
| | X2 | ,039 | ,019 | 1,101 | 2,045 | ,043 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan program SPSS

Keterangan: *) Signifikan pada taraf 5%

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel diatas dapat dibuat model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,464 - 0,047X_1 + 0,039X_2$$

- Konstanta bernilai 5,464 artinya, jika variabel X1 dan X2 memiliki nilai konstan maka variabel dependen (Y) bernilai 5,464.
- Koefisien regresi variabel X1 0,047 negatif yang artinya, setiap peningkatan variabel X1 sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Y sebesar -0,047 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien regresi variabel X2 bernilai 0,039 positif yang artinya, setiap variabel X2 sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel kualitas Y sebesar 0,039 dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 6
Hasil Uji Signifikansi

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 5,464 | ,189 | | 28,877 | ,000 |
| | X1 | -,047 | ,034 | -,745 | -1,385 | ,169 |
| | X2 | ,039 | ,019 | 1,101 | 2,045 | ,043 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan menggunakan program SPSS

Pengaruh Hipotesis Variabel Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

$H_0 : \alpha_1 \geq 0$ Kemampuan Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1 : \alpha_1 < 0$ Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari Tabel diatas dapat diketahui nilai signifikan untuk X1 yakni 0,161 lebih dari 0,05 ($0,161 > 0,05$) dengan beta bernilai negatif 0,047 , sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan kata lain Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Makmuralto, Mukhlis Sufri,

Muhammad Arif (2020) bahwa Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Hipotesis Variabel Kemandirian Daerah (KMD)

$H_0 : \alpha_1 \geq 0$ Kemandirian Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_2 : \alpha_1 < 0$ Kemandirian Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari Tabel diatas dapat diketahui nilai signifikan untuk X_2 yakni 0,043 kurang dari 0,05 ($0,043 < 0,05$) dengan beta bernilai positif 0,039 , sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan kata lain Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Jalu Aji Prakoso, Fitrah Sari Islami, dan Rr Retno Sugiharti (2019) dan Stannia Cahaya Suci dan Alla Asmara (2014) bahwa Kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan rasio kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah kurang karena hanya memiliki rata-rata 17,06%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih rendah dalam melaksanakan otonominya.
2. Berdasarkan rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 21,34% masih berada diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.
3. Hasil analisis menunjukkan Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (growth), artinya semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah tidak akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

b. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi kemandirian daerah dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

- a. Intensifikasi
 - 1) Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah harus lebih tertib lagi dalam menetapkan dan penyetoran pajak terutama daerah yang memiliki rasio kemampuan kurang.
 - 2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif sesuai peraturan yang berlaku.
 - 3) Melakukan langkah pengendalian lain guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
- b. Ekstensifikasi
 - 1) Menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
 - 2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
2. Masyarakat harus selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bersifat membangun. Oleh karena itu sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah harus benar-benar dikembangkan secara optimal agar tujuan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan , dan lain-lain (12 point, spasi 1).

Ketentuan penulisan daftar pustaka menggunakan APA STYLE:

- **Buku** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, *judul buku* (harus ditulis miring) volume (jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit
Castleman, K. R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey
- **Buku Terjemahan** dengan urutan penulisan: Penulis asli (nama depan, tengah. (disingkat), belakang. (disingkat)), tahun buku terjemahan, *judul bukuterjemahan* (harus ditulis miring), volume (jika ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan oleh : nama penerjemah), nama penerbit terjemahan dan kota penerbit terjemahan.
Gonzales, R., P. 2004, *Digital Image Processing (Pemrosesan Citra Digital)*, Vol. 1, Ed.2, diterjemahkan oleh Handayani, S., Andri Offset, Yogyakarta

●*Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah:*

- Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.
Yusoff, M, Rahman, S.A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159

Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet (tidak diperkenankan melakukan sitasi artikel dari internet yang tidak ada nama penulisnya):

- **Artikel majalah ilmiah versi cetakan** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.
Wallace, V. P., Bamber,J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance spectra from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminant analysis and artificial neural network. *Journal Physical Medical Biology* , No.45, Vol.3, 2859-2871
- **Artikel majalah ilmiah versi online** dengan urutan penulisan:Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* ((harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume, halaman dan alamat website.

Xavier Pi-Sunyer, F., Becker, C., Bouchard, R.A., Carleton, G. A., Colditz, W., Dietz, J., Foreyt, R. Garrison, S., Grundy, B. C., 1998, Clinical Guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults, *Journal of National Institutes of Health*, No.3, Vol.4, 123-130, http://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/1998/12001/paper_treatment_of_obesity.pdf

- **Artikel umum** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *alamat website* (harus ditulis miring), diakses tanggal ...
Borglet, C, 2003, Finding Association Rules with Apriori Algorithm,<http://www.fuzzy.cs.uniagdeburg.de/~borglet/apriori.pdf>, diakses tgl 23 Februari 2007

Daftar Pustaka hanya memuat semua pustaka yang diacu pada naskah tulisan. Pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad penulis. Sistematika penulisan setiap daftar pustaka ditulis dengan baris pertama rata kiri dan baris ke dua maupun selanjutnya menjorok ke kanan 1 cm dan diakhiri tanpa tanda titik.(12 point, spasi 1)